



POLA PENYELESAIAN KONFLIK: STUDI KASUS PEMETAAN WILAYAH ADAT PAPUA PEGUNUNGAN

Sabriani¹, Andi Astri Faradiba², Yusman³

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Email Korespondensi: sabrianiamirr@gmail.com

Abstrak

Pola pendekatan penyelesaian terhadap konflik sosial di Papua Pegunungan memerlukan pemahaman yang dalam tentang konteks budaya, politik, dan sejarah wilayah tersebut. Beberapa pola pendekatan yang mungkin digunakan dalam penyelesaian konflik di Papua khususnya Papua Pegunungan yang masih melibatkan berbagai hal seperti mengadakan dialog terbuka antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemimpin lokal (adat) dan budaya, hal tersebut dapat mengurangi ketegangan sosial karena menurut masyarakat adat mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan identitas etnis di Papua menjadi suatu penghormatan besar. Fokus pada penelitian ini ingin mengetahui pola-pola penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat adat terkhusus masyarakat wilayah adat Papua Pegunungan. Pendekatan yang holistik dengan kajian buku-buku, jurnal, kejadian-kejadian yang terekspose di media sosial, penelitian terdahulu dan berkelanjutan yang akan dijadikan data pada penyelesaian masalah ini. Pola-pola yang ditemukan menggabungkan berbagai elemen ini memungkinkan akan lebih efektif dalam menangani konflik sosial di Papua Pegunungan dan mempromosikan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Konflik, Masyarakat Adat, Papua Pegunungan.

CONFLICT RESOLUTION PATTERNS: CASE STUDY OF Mapping THE MOUNTAIN PAPUA TRADITIONAL AREA

Abstract

The pattern of approaches to resolving social conflicts in Papua requires a deep understanding of the cultural, political and historical context of the region. Several patterns of approach that might be used in resolving the conflict in Papua include various things. Holding open dialogue between the government, community groups and local (customary) leaders, mediation, establishing community forums, and providing greater access to human resources in expressing opinions on the conflicts they face, this can reduce social tension because According to indigenous peoples, recognizing and respecting cultural diversity and ethnic identity in Papua is a great honor. The focus of this research is to find out the patterns of problem solving carried out by indigenous communities, especially the indigenous communities of Mountain Papua. A holistic approach by studying books, journals, events exposed on social media, previous and ongoing research that will be used as data to solve this problem. The patterns found combining these



various elements are likely to be more effective in dealing with social conflict in Highland Papua and promoting peace and sustainable development in the region.

Keywords : Conflict, Indigenous Peoples, Papua Mountains.

Pendahuluan

Masyarakat adat atau disebut masyarakat hukum adat adalah konsep untuk menunjuk kepada komunitas-komunitas adat/kelompok manusia (*adat rechtsgenebschappen*) yang merupakan bagian terbesar dari populasi. Pengertian siapa dan dimana masyarakat adat berada belumlah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat luas. Sering terjadi salah paham jika kita mengkaji identitas masyarakat adat, yang ada dalam bayangan kita adalah sekelompok kecil masyarakat, penduduk asli suatu negara, orang-orang pinggiran yang hidup di hutan, padang pasir, atau daerah kutub, masyarakat yang tertindas atau mereka yang mempunyai budaya berbeda dengan masyarakat umum disekelilingnya (IWGIA, 2001), fakta di atas ada benarnya tetapi saat ini sangat rumit sekali menentukan siapa yang disebut masyarakat adat. Banyak negara yang tidak mengakui keberadaan masyarakat adat di negaranya umumnya di Afrika dan Asia. Tetapi ada negara yang mengaku keberadaan masyarakat adat tetapi mereka tetap menjadi masyarakat yang terpinggirkan (Nurhidayat, 2023).

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (Bagus Saswoyo, 2023). Masyarakat adat di Papua memiliki peran penting dalam dinamika sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Masyarakat adat di Papua sering kali memiliki hubungan yang dalam dengan tanah, alam, dan sumber daya alam, serta mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya mereka yang khas. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat (Widadio, 2019).



Gambar 1. Masyarakat Adat Papua (Sumber: ilustrasi/net).

Masyarakat adat di Papua terdiri dari beragam suku dan kelompok etnis yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik (Purwanti, 2023). Beberapa suku adat yang terkenal di Papua antara lain:

1. Suku Dani adalah salah satu suku terbesar di Papua, terutama tersebar di dataran tinggi Baliem. Mereka dikenal dengan tradisi perang suku dan rumah tradisional berbentuk bulat yang disebut honai.
2. Suku Asmat terkenal dengan seni ukirnya yang indah dan kompleks. Mereka tinggal di daerah pesisir selatan Papua dan mengandalkan kehidupan mereka pada perikanan dan berburu.
3. Suku Biak adalah salah satu suku pesisir yang mendiami Pulau Biak. Mereka memiliki tradisi yang kaya dalam seni, musik, dan tarian, serta merupakan pelaut yang terampil.
4. Suku Amungme dan Kamoro mendiami wilayah pegunungan tengah dan pantai selatan Papua. Mereka terlibat dalam industri pertambangan dan memiliki budaya yang unik.
5. Suku Sentani mendiami daerah sekitar Danau Sentani di sebelah Utara Jayapura. Mereka terkenal dengan kerajinan tangan mereka, termasuk tenun dan ukiran kayu.
6. Suku Yali merupakan suku pedalaman yang tinggal di Pegunungan Tengah Papua. Mereka hidup sebagai petani dan pemburu.
7. Suku Lani mendiami daerah sekitar Wamena di Pegunungan Baliem. Mereka juga dikenal sebagai petani dan pemburu.

Inilah hanya beberapa contoh suku adat di Papua. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi unik mereka sendiri yang mencerminkan kekayaan budaya Papua yang beragam. Penting untuk menghormati dan mendukung pemeliharaan keberagaman budaya ini dalam pendekatan konflik dan pembangunan di Papua.

Hak ulayat memiliki wewenang untuk 3 (Muhaimin, 2023):

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Kelompok masyarakat adat di Papua pegunungan, seperti suku-suku Dani, Lani, Amungme, dan suku-suku lainnya, memiliki kekayaan budaya yang unik dan khas. Mereka memiliki sistem sosial, kepercayaan, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut ini beberapa ciri khas kelompok masyarakat adat Papua di pegunungan (Awoitauw, 2021):

1. Sistem Sosial Tradisional: Kelompok masyarakat adat di Papua pegunungan umumnya memiliki struktur sosial yang didasarkan pada keluarga dan klan. Mereka hidup dalam komunitas kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang terkait oleh ikatan kekerabatan.
2. Kehidupan Agraris: Pertanian merupakan kegiatan utama dalam kehidupan kelompok masyarakat adat di Papua pegunungan. Mereka menanam tanaman seperti ubi, jagung, dan sayuran di ladang-ladang mereka, dengan menggunakan teknik tradisional.
3. Kepercayaan dan Upacara Adat: Kepercayaan tradisional masih sangat kuat di kalangan masyarakat adat Papua di pegunungan. Mereka percaya pada roh nenek moyang dan menjalankan berbagai upacara adat untuk menghormati mereka, seperti upacara panen, pernikahan, dan penyembuhan.
4. Seni dan Budaya: Seni anyaman, ukiran kayu, dan tarian-tarian tradisional merupakan bagian integral dari budaya kelompok masyarakat adat Papua di pegunungan. Mereka menghasilkan karya seni yang indah dan unik, yang sering kali mencerminkan kehidupan sehari-hari dan kepercayaan spiritual mereka.
5. Tantangan Modernisasi: Seperti kelompok masyarakat adat di tempat lain, kelompok masyarakat adat Papua di pegunungan juga dihadapkan pada tantangan modernisasi. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan masuknya budaya luar merupakan beberapa tantangan yang mereka hadapi dalam mempertahankan identitas dan budaya mereka.

Penting untuk diingat bahwa setiap kelompok masyarakat adat di Papua memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri (Kusnadi, 2022). Memahami dan menghormati budaya dan kehidupan tradisional mereka adalah langkah penting dalam menjaga keragaman budaya dan mendukung upaya pelestarian warisan budaya Papua.

Mereka dikenal dengan kehidupan tradisional mereka yang masih kuat, seringkali hidup dalam komunitas kecil yang bersifat agraris, mereka memiliki ciri khas dari masyarakat Papua (Palenewen, 2024) yaitu:

1. Sistem Sosial Tradisional: Masyarakat Papua di pegunungan memiliki sistem sosial tradisional yang kompleks, dengan struktur sosial yang didasarkan pada keluarga dan klan. Mereka sering tinggal dalam rumah-rumah suku yang disebut honai, yang dibangun dengan anyaman daun dan kayu.
2. Pertanian dan Pertukaran: Pertanian adalah kegiatan utama di wilayah pegunungan Papua. Masyarakat tersebut biasanya menanam tanaman seperti ubi, jagung, dan sayuran di ladang-ladang mereka. Pertukaran barang juga merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi mereka, di mana barang-barang seperti babi, kulit, dan alat-alat tradisional diperdagangkan.
3. Bahasa dan Budaya: Masyarakat Papua di pegunungan sering memiliki bahasa dan budaya yang unik. Ada banyak bahasa yang berbeda di antara suku-suku yang berbeda, dan warisan budaya mereka mencakup seni anyaman, ukiran kayu, dan tarian-tarian tradisional yang indah.
4. Agama dan Kepercayaan: Mayoritas masyarakat Papua di pegunungan masih mempraktikkan agama dan kepercayaan tradisional mereka. Mereka mempercayai roh nenek moyang dan menjalankan upacara-upacara adat untuk menghormati mereka. Namun, ada juga pengaruh agama-agama lain, seperti Kekristenan, yang semakin masuk ke dalam masyarakat tersebut.
5. Tantangan Modernisasi: Meskipun banyak aspek kehidupan mereka masih tradisional, masyarakat Papua di pegunungan juga dihadapkan pada tantangan modernisasi. Urbanisasi, perdagangan global, dan perubahan iklim semuanya memiliki dampak pada kehidupan mereka, baik secara positif maupun negatif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengkajian yang menitikberatkan kepada penyelesaian konflik sosial masyarakat adat khususnya masyarakat adat di Papua Pegunungan. Untuk menjelaskan konflik dan penyelesaiannya yang terjadi di masyarakat hukum adat Papua Pegunungan digunakan pendekatan naturalistik, kajian buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini dengan maksud ingin melihat lebih jauh dalam hubungannya dengan sistem sosial, budaya dan politik.

Sumber Data

Dalam pengkajian ini menggunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta surat kabar atau majalah, dan juga data dari internet yang terkait dengan mekanisme penyelesaian konflik masyarakat hukum adat. Kemudian data tersebut diinventarisir dan diklasifikasikan serta disusun secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Mengakui dan menghormati keberagaman budaya dan identitas etnis di Papua. Mempromosikan pemeliharaan bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Papua dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi dalam konflik di Papua. Ini termasuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan mengadili pelaku kejahatan, termasuk aparat keamanan yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan. Memberikan otonomi yang lebih besar kepada Provinsi Papua untuk mengelola sumber daya alam dan kebijakan pembangunan lokal, sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat Papua. Mendorong partisipasi pemimpin muda Papua dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memberikan mereka peluang yang adil dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang menggabungkan berbagai elemen ini, kemungkinan akan lebih efektif dalam menangani konflik sosial di Papua dan mempromosikan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut terkhusus daerah Papua Pegunungan.

Pendekatan terhadap konflik sosial di Papua Pegunungan memerlukan pemahaman yang dalam tentang konteks budaya, politik, dan sejarah kawasan tersebut. Beberapa pola pendekatan yang mungkin digunakan dalam penyelesaian konflik di Papua Pegunungan meliputi berbagai hal. Mengadakan dialog terbuka antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemimpin lokal untuk mendengarkan kekhawatiran, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat hukum adat (Soepomo, 2019). Mediasi oleh pihak netral juga dapat membantu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mendorong partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum-forum masyarakat, pelatihan keterampilan, dan pemberian akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan politik.

Masyarakat Papua Pegunungan, terutama yang tinggal di daerah-daerah seperti Baliem Valley di Papua, memiliki budaya yang kaya dan unik termasuk dalam penyelesaian konflik. Beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik di Papua antara lain:

1. Masalah Politik: Konflik politik di Papua sering kali berkaitan dengan tuntutan otonomi yang lebih besar, kemerdekaan, atau hak penentuan nasib sendiri oleh sebagian masyarakat Papua. Ini sering memunculkan ketegangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok separatis di wilayah tersebut.
2. Ketidakpuasan Ekonomi: Kesenjangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia dapat menjadi sumber ketegangan. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, namun pendapatan dari eksploitasi sumber daya tersebut tidak selalu mengalir ke masyarakat Papua secara adil.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pelaporan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penindasan politik, kekerasan oleh aparat keamanan, dan pembatasan kebebasan berpendapat di Papua, telah menjadi sumber konflik dan ketegangan.
4. Konflik Agraria: Konflik atas tanah antara masyarakat adat Papua dan pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah untuk proyek-proyek pembangunan, seperti pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur, seringkali memicu ketegangan dan konflik.
5. Ketidakpuasan Sosial: Ketidakpuasan sosial yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja dapat menjadi sumber ketegangan di antara masyarakat Papua.
6. Ketegangan Etnis: Papua adalah wilayah yang beragam secara etnis, dan konflik antara berbagai kelompok etnis dapat terjadi, terutama terkait dengan klaim atas tanah dan sumber daya alam.
7. Ketegangan Agama: Meskipun Papua secara mayoritas berpenduduk Kristen, namun ada juga kelompok agama minoritas di wilayah tersebut. Konflik antar-agama dapat terjadi, terutama di daerah dengan keberagaman agama yang tinggi.

Pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Papua Pegunungan memerlukan pengakuan dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai faktor yang menyebabkan konflik, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya.

Masyarakat Papua Pegunungan adalah bagian wilayah yang melestarikan kekayaan budaya, dengan warisan tradisional mereka yang berharga dan kehidupan komunal yang unik. Bagian tersebut yang dijadikan sebagai penyelesaian konflik yang kerap terjadi.

1. Dialog Terbuka Antar Pemerintah

Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua Pegunungan. Dialog terbuka yang dapat menjadi dasar bagi upaya perdamaian dan penyelesaian konflik, pemerintah bertekad untuk meningkatkan

akses dan pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan dan lapangan kerja. Pemerintah yang sepenuhnya menghormati hak-hak dan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian, keadilan, dan pembangunan di Papua Pegunungan. Pemerintah bekerja sama dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua Pegunungan siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses dialog dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua Pegunungan.

2. Kelompok Masyarakat Adat (Perang Suku)

Dalam penyelesaian konflik di Papua Pegunungan, melibatkan kelompok masyarakat adat adalah langkah penting untuk mencapai perdamaian. Ada beberapa cara bagaimana kelompok masyarakat hukum adat Papua Pegunungan dapat berperan dalam penyelesaian konflik. Mediasi dengan kelompok masyarakat hukum adat dapat berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik itu antara masyarakat lokal dengan pemerintah, antar kelompok masyarakat, atau antara kelompok masyarakat dengan perusahaan atau pihak lainnya. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang dihormati dapat membantu dalam membangun dialog yang konstruktif dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan budaya dan tradisional, memahami dan menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat hukum adat Papua Pegunungan adalah kunci dalam penyelesaian konflik. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dapat membantu dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan menciptakan ruang bagi solusi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka, proses demokrasi, perdamaian, dan penyelesaian konflik adalah langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk keadilan. Kelompok masyarakat hukum adat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi dan pendidikan tentang perdamaian dan hak asasi manusia di komunitas mereka. Kolaborasi antara kelompok masyarakat adat, pemerintah, LSM, dan pihak lainnya juga penting dalam penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber konflik, menciptakan solusi yang berkelanjutan, dan mengimplementasikan program-program yang mendukung perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Pegunungan. Dengan melibatkan kelompok masyarakat hukum adat Papua Pegunungan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik, dapat diharapkan bahwa solusi yang ditemukan akan lebih berkelanjutan dan menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.



Gambar 2: Perang Suku dan Keterlibatan Pemerintahan Keamanan (sumber: WAG IKKW)

3. Musyawarah Pemimpin Lokal

Musyawarah merupakan salah satu prinsip yang sangat dihormati dalam budaya masyarakat adat Papua. Dalam penyelesaian konflik, musyawarah masyarakat adat Papua sering kali menjadi metode yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Musyawarah masyarakat adat Papua melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam konflik tersebut, baik itu tokoh masyarakat, pemimpin adat, anggota komunitas, dan pihak terkait lainnya. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka. Dalam musyawarah ini, adat dan budaya masyarakat Papua dihormati dan dipertimbangkan secara serius. Nilai-nilai tradisional seperti keadilan, kebersamaan, dan persaudaraan menjadi pedoman dalam mencapai kesepakatan. Musyawarah dilakukan dalam suasana yang demokratis, di mana setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan pendapatnya didengar. Keputusan diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama.

Musyawarah masyarakat adat Papua sering kali mengedepankan pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediasi dilakukan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pemimpin adat atau tokoh-tokoh masyarakat memegang peran penting dalam memfasilitasi musyawarah ini. Mereka bertindak sebagai mediator dan pemimpin rohani yang memberikan arahan dan nasihat dalam mencari solusi. Setelah mencapai kesepakatan, penting untuk menghormati dan melaksanakan keputusan yang diambil melalui musyawarah. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang.

4. Budaya Lokal (Palang)

"Budaya Palang Jalan" adalah istilah yang merujuk pada praktek budaya di Papua Pegunungan yang melibatkan prosesi di mana dua pihak yang berselisih menyelesaikan konflik dengan berjalan di antara dua barisan orang yang memegang panah yang dilontarkan ke arah keduanya. Budaya ini sering kali menjadi bagian dari upacara adat untuk menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok atau individu. Penggunaan praktik budaya tradisional seperti Palang Jalan menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal dan upaya untuk menyelesaikan konflik atau menolak sesuatu dengan cara yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat Papua. Seperti dalam banyak praktik budaya tradisional, tujuan dari palang jalan dalam menyelesaikan konflik sosial di Papua Pegunungan mungkin lebih terfokus pada pemulihan hubungan antara pihak yang berselisih daripada hanya menetapkan siapa yang benar atau salah.



Gambar 2: Budaya palang jalan dalam penyelesaian masalah (Sumber: @infowamena).

Meskipun palang jalan bisa dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai, namun keselamatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat tetap harus menjadi prioritas. Prinsip-prinsip HAM dan hukum yang berlaku harus dihormati dan diperhatikan. Budaya lokal yaitu palang jalan biasanya melibatkan partisipasi luas dari komunitas setempat. Ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik. Namun demikian bahwa setiap

budaya harus dinilai dengan konteksnya sendiri, dan tidak selalu cocok atau relevan untuk menyelesaikan konflik sosial yang kompleks. Penggunaan budaya palang jalan dalam konteks konflik sosial di Papua Pegunungan mungkin membutuhkan penyesuaian dan pertimbangan tambahan agar sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai modern, serta untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan tetap dihormati.

5. Tradisi (Bakar Batu)

Tradisi bakar batu di Papua tidak hanya mempunyai makna dalam hal memasak makanan secara tradisional, tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai metafora yang menginspirasi dalam penyelesaian masalah konflik sosial, dimana tradisi ini dapat dihubungkan dengan konflik dan perdamaian. Tradisi bakar batu melibatkan proses persiapan bersama dan kerjasama dalam mempersiapkan serta memasak makanan. Hal ini mencerminkan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menyelesaikan konflik. Ketika masyarakat hukum adat Papua berkumpul untuk melakukan tradisi ini, mereka tidak hanya memasak makanan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat di antara sesama. Proses memilih batu yang tepat, memanaskan batu dalam api, dan memasak makanan secara perlahan-lahan menggambarkan kesabaran dan kerja sama yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah konflik.



Gambar 2. Prosesi Bakar Batu Masyarakat Adat Papua Pegunungan (Sumber:yukpegi.com).

Tradisi ini dapat dijadikan analogi untuk mengilustrasikan pentingnya proses rekonsiliasi yang cermat dan hati-hati dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik. Masyarakat hukum adat Papua Pegunungan melestarikan tradisi bakar batu dari generasi ke generasi sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Dalam konteks penyelesaian konflik, menghormati dan mengambil hikmah dari tradisi lama dapat membawa pandangan yang lebih mendalam dan bijaksana dalam menangani konflik modern. Meskipun tradisi bakar batu mungkin tidak secara langsung mengatasi konflik sosial yang kompleks, penghargaan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan inspirasi untuk menciptakan dialog, kerjasama, dan mediasi di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Kesimpulan

Penyelesaian konflik wilayah adat di Papua memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dialog antar pemerintah, kelompok masyarakat adat, musyawarah pemimpin lokal, budaya lokal dan tradisi/kebiasaan. Pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Papua Pegunungan memerlukan pengakuan dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai faktor yang menyebabkan konflik, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya.

Referensi

- Awoitauw, M. (2021). *Kembali ke Kampung Adat: Meniti Jalan Perubahan di Tanah Papua*. Jakarta: Gramedia.
- Bagus Saswoyo, A. M. (2023). *Referensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara*. *Jurnal Suara Hukum*, 19-43.
- Kusnadi. (2022). *Ensiklopedia Indonesia Provinsi papua*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhaimin, B. M. (2023). KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM ADAT SUKU DANI DI PAPUA. *JURNAL HUKUM*, 35-52.
- Nurhidayat. (2023). Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia . *Jurnal Kewarganegaraan*, 234-246.
- Palenewen, D. T. (2024). *Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua*. Bandung: Widina Media Utama.
- Purwanti, I. W. (2023). Budaya Bakar Batu Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal . *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1-11.
- Safitri, N. (2011). MASALAH SOSIAL DAN KONFLIK MASYARAKAT ADAT PAPUA (Tinjauan Antropologis). *JURNAL ILMU SOSIAL-FAKULTAS ISIPOL UMA*, 28-40.
- Soepomo. (2019). *Kedudukan Hukum Adat di kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Widadio, N. (2019). Riwayat Konflik Papua, Tanah Kaya di Ujung Timur Indonesia. *Analisis Nasional*, 1-8.